

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**LAPORAN EVALUASI
RENCANA KERJA (RENJA)**



JANUARI S.D. JUNI 2023

KATA PENGANTAR

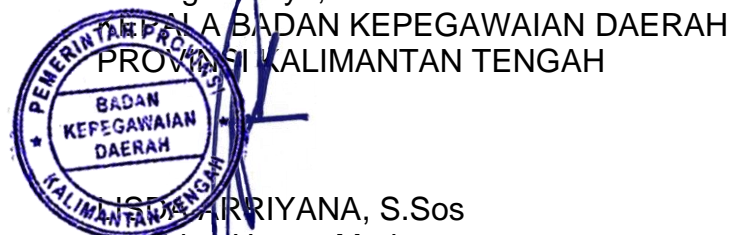
Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Semester I Tahun Anggaran 2023.

Laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Semester I Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen evaluasi pelaksanaan kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 1 (satu) semester. Penyusunan Laporan Evaluasi RENJA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Evaluasi RENJA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada semester I (Januari s.d. Juni 2023), fenomena yang ada, serta isu strategis yang akan dihadapi pada tahap pelaksanaan. Tujuan Penyusunan Evaluasi RENJA BKD Provinsi Kalimantan Tengah Semester I Tahun 2023 ini adalah sebagai acuan bagi BKD Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengoperasionalkan RKPD 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai visi dan misi agenda kerja utama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2021-2024.

Sebagai penutup, segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam pertimbangan dan keberlanjutan.

Palangka Raya, 10 Juni 2023



ISMAH RIRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19680901 198911 2 005

A. Latar Belakang

Evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan setiap semester berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan.

Berdasarkan amanat Pasal 259 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Kalimantan Tengah setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Sehingga dari hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun selanjutnya.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tahun 2023 merupakan tahun ke 2 (dua) pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Adapun evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk memastikan indikator kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang telah disusun, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Semester I Tahun 2023 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
8. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah Semester I Tahun 2023 ini diantaranya adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Semester I (Januari s.d. Juni) tahun 2023, review isu strategis pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun selanjutnya.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Evaluasi Rencana Kerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah Semester I Tahun 2023 antara lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BKD Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mendorong BKD Provinsi Kalimantan Tengah di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BKD Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Metode Evaluasi

Untuk evaluasi kinerja pembangunan di tahun berjalan, BKD Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan metode evaluasi *trend analysis*. Membandingkan data antar waktu, mengamati kecenderungan data secara menyeluruh, dan melihat rata-rata perubahan suatu data dari waktu ke waktu. Dari analisis ini diharapkan ada simpulan atau rekomendasi kebijakan selanjutnya. Jika trend menurun dan stagnan maka perlu upaya yang sangat strategis untuk mencapai target, sementara jika trend moderat artinya sudah ada peningkatan namun masih perlu upaya untuk percepatan. Sedangkan jika capaian sudah sejalan dengan target artinya hampir memenuhi target akhir, maka perlu dipertahankan kinerjanya.

Secara umum ruang lingkup evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

1. Mengidentifikasi indikator sesuai dengan prioritas daerah pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 serta pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Identifikasi ketersediaan data berdasarkan indikator yang telah disinkronisasikan.
3. Melakukan analisis dan evaluasi capaian berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
4. Mengkaji isu strategis dan rekomendasi kebijakan tahun 2021-2026.
5. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Dasar Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Metode Evaluasi
- I.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN RENJA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

BAB III CAPAIAN RENJA DAN FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

A. Rencana Strategis

a. A.1 Pernyataan Visi dan Misi

Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 di buat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021-2024 adalah sebagai berikut :



VISI
Kalimantan Tengah Makin
**BERKAH : Bermartabat,
Elok, Religius, Kuat,
Amanah, dan Harmonis**

MISI

- Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif, dan Berwawasan Lingkungan
- Memperkuat Ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi
- Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, dan Berdaya Saing
- Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

H. SUGIANTO SABRAN
Gubernur Kalimantan Tengah

H. EDY PRATOWO
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pencapaian **Misi Ketiga** yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi**. Dalam lingkup bidang kepegawaian, misi ini mengisyaratkan perlunya

BKD selaku unsur penunjang urusan pemerintahan pada pelayanan kepegawaian untuk melakukan reformasi birokrasi pada bidang manajemen ASN.

b. A.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan Tujuan Strategis berdasarkan visi dan misi. Rumusan tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:



Terwujudnya Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang Kompeten, Kompetitif, dan Profesional

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran perwakilan merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Adapun isi sasaran strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD (2021-2026)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang Kompeten, Kompetitif, dan Profesional	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional	Persentase Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	3,00%	5,00%	8,00%	90,00%	95,00%
			Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%
			Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%
			Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	54	54	54	54	54
			Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1006	1010	1013	1015	1017
			Jumlah pemangku jabatan fungsional	6000	6200	6400	6600	6800

			tertentu pada instansi pemerintah					
			Indeks Profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	75,50	76,00	77,70	78,00	78,50
			Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
			Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	80,00%	85,00%	85,00%	90,00%	95,00%
			Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	70,00%	72,00%	72,00%	75,00%	75,00%

Sumber : Dokumen Rencana Strategis BKD Prov. Kalteng 2021-2026

Berikut ini merupakan tabel keselarasan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 :

Tabel 2 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BKD (2021-2026)

Visi : Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis				
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi				
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang Kompeten, Kompetitif, dan Profesional	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Penyusunan Grand Design Manajemen ASN	Penyusunan Formasi sesuai kebutuhan jabatan setiap unit sesuai dengan analisis beban kerja
				Pemetaan kompetensi individu dan redistribusi PNS sehingga tercipta prinsip <i>right men on the right place</i>
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Pelaksanaan rekrutmen, seleksi terbuka jabatan, mutasi dan rotasi SDM sesuai kompetensi	Penerapan Sistem Merit
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		
		Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	Penerapan Manajemen Talenta	
		Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN		
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		Pembaharuan pola rekrutmen dan seleksi sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan menggunakan
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi				

Visi : Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis

Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
		pemerintah		<i>assesment</i>
		Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	Mengembangkan sistem manajemen kinerja ASN	Penetapan indikator aktivitas kerja terukur sesuai dengan level jabatan (cascading kinerja)
				Sistem reward dan punishment yang terintegrasi melalui e-kinerja
			Melakukan internalisasi budaya organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Melakukan pembinaan profesi melalui jiwa korps dan kode etik PNS secara berkelanjutan
				Penetapan Agen Perubahan
				Penandatanganan Pakta Integritas
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian	Sinkronisasi data SIMPEG dengan data dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN
		Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	Penerapan sistem pelayanan Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi	Monitoring dan evaluasi terkait Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kepegawaian

Visi : Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis				
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi				
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
			Pengembangan Kapasitas ASN BKD Provinsi Kalimantan Tengah	Keikutsertaan ASN BKD dalam program diklat pengelolaan kepegawaian yang berbasis sertifikat

Sumber : Dokumen Rencana Strategis BKD Prov. Kalteng 2021-2026

F. Rencana Kerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah

Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan tugas di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah menetapkan Visi yaitu “Profesional Dalam Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian”.

Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2019. Renja SKPD tersebut memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju.

Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

B. Rencana Program dan Kegiatan pada RENJA BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023

Indikator Kinerja Utama merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Berdasarkan dokumen penetapan Indikator Kinerja Utama BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, terdapat 1 (satu) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai be

Tabel 3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	PROV KALTENG	1 tahun		PAD	-		
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	PROV KALTENG	1 tahun	1.268.948.280	PAD	-	1 tahun	1.482.747.504
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tergunakannya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	PROV KALTENG	1 tahun	450.130.200	PAD	-	1 tahun	450.130.200
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	PROV KALTENG	1 tahun	5.000.000	PAD	-	1 tahun	15.000.000
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tertaksananya pelayanan umum kantor dan informasi publik	PROV KALTENG	1 tahun	813.818.080	PAD	-	1 tahun	1.017.617.304
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	PROV KALTENG	1 tahun	1.387.811.042	PAD	-	1 tahun	1.261.561.042
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	PROV KALTENG	200000 Lembar	55.000.000	PAD	-	200000 Lembar	55.000.000
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, peralatan dan perlengkapan	PROV	4 Jenis	400.000.000	PAD	-	4 Jenis	356.172.842

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		kantor selama 1 tahun	KALTENG						
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai berupa koran dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun	PROV KALTENG	2 Media	55.000.000	PAD	-	2 Media	55.000.000
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkoordinasinya dan terkonsultasikannya program dan kegiatan kepegawaian dan tersedianya makan minum rapat koordinasi pegawai selama 1 tahun	PROV KALTENG	14 Kab/Kota dan 3 Instansi Pusat	849.911.042	PAD	-	14 Kab/Kota dan 3 Instansi Pusat	767488200
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	PROV KALTENG	1 Tahun	27.900.000	PAD	-	1 Tahun	27900000
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PROV KALTENG	1 Tahun	70.000.000	PAD	-	1 Tahun	70.000.000
5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	PROV KALTENG	1 Tahun	70.000.000	PAD	-	1 Tahun	70.000.000
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemda	PROV	1 Tahun	662.430.000	PAD	-	1 Tahun	556.430.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Urusan Pemerintahan Daerah		KALTENG						
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perbaikan perlengkapan kerja yang rusak	PROV KALTENG	200 Unit	32.500.000	PAD	-	200 Unit	32.500.000
5.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	PROV KALTENG	2 Gedung	350.000.000	PAD	-	2 Gedung	250.000.000
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan bermotor dan Terbayarkannya pajak kendaraan bermotor selama 1 tahun	PROV KALTENG	30 Unit	260.410.000	PAD	-	30 Unit	254410000
5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya secara rutin/berkala prasarana pendukung gedung kantor	PROV KALTENG	37 Unit	19.520.000	PAD	-	37 Unit	19.520.000
5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PROV KALTENG	1 tahun	23.418.000	PAD	-	1 tahun	23.418.000
5.03.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terasuransikannya dan tertatanya aset dan inventarisasi BKD Prov Kalteng	PROV KALTENG	1,491 Unit	23.418.000	PAD	-	1,491 Unit	23.418.000
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi keuangan Daerah pada Perangkat Daerah	PROV KALTENG	1 tahun	6.886.320.914	PAD	-	1 tahun	6.886.320.914
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	PROV KALTENG	1 tahun	6.858.927.914	DAU PAD	-	1 tahun	6.858.927.914

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan semesteran aset	PROV KALTENG	1 Laporan	13.529.000	PAD	-	1 Laporan	13.529.000
5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhirtahun	PROV KALTENG	1 Laporan	13.864.000	PAD	-	1 Laporan	13.864.000
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terkelolanya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Perangkat Daerah	PROV KALTENG	1 tahun	140.030.224	PAD	-	1 tahun	96.231.000
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	PROV KALTENG	10 Laporan	81.965.224	PAD	-	10 Laporan	74166000
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	PROV KALTENG	7 Dokumen	58.065.000	PAD	-	7 Dokumen	22065000
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	PROV KALTENG	1 tahun	163.986.000	PAD	-	1 tahun	58.986.000
5.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pengadaan pakaian dinas selama 1 tahun	PROV KALTENG	1 Paket	105.000.000	PAD	-	1 Paket	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PROV KALTENG	2 Orang	7.500.000	PAD	-	2 Orang	7.500.000
5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	PROV KALTENG	100 Orang	51.486.000	PAD	-	100 Orang	51.486.000
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Terkelolanya administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	PROV KALTENG	1 tahun		PAD	-	1 tahun	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	PROV KALTENG	1 tahun	89.693.900	PAD	-	1 tahun	132.307.660
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Seleksi dan Monitoring Tugas Belajar dan Ijin Belajar	PROV KALTENG	1 tahun	50.791.700	PAD	-	1 tahun	70.791.700
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Tertatanya Jabatan Fungsional di Pemprov Kalteng	PROV KALTENG	800 SK	38.902.200	PAD	-	800 SK	61.515.960
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya mutasi dan promosi ASN	PROV KALTENG	1 tahun	711.925.000	PAD		1 tahun	1.113.840.000,00
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terkelolanya Kenaikan Pangkat PNS	PROV KALTENG	4000 SK 400 Orang	85.000.000	PAD		4000 SK 400 Orang	60.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				400 Orang				400 Orang	
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Terisinya Jabatan Struktural dan Jabatan Pimpinan Tinggi pada Pemprov Kalteng	PROV KALTENG	1 Kali 70 Orang	600.000.000	PAD		1 Kali 70 Orang	1.036.915.000
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Tertaksananya proses Mutasi PNS	PROV KALTENG	2 kali	26.925.000	PAD		2 kali	16.925.000
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tertaksananya penilaian dan evaluasi kinerja ASN	PROV KALTENG	1 tahun	175.340.500	PAD		1 tahun	150.340.500,00
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terkelolanya penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan kasus cerai PNS	PROV KALTENG	50 Laporan	88.944.500	PAD		50 Laporan	88.944.500
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terkelolanya Pemberian Penghargaan Bagi PNS	PROV KALTENG	250 PNS 2 Kegiatan	61.396.000	PAD		250 PNS 2 Kegiatan	61.396.000
5.03.02.1.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terkelolanya Dokumen Proses Izin Perceraian Bagi PNS	PROV KALTENG	10 Dokumen	25.000.000	PAD		10 Dokumen	25.000.000
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tertaksananya pengadaan PNS, administrasi pemberhentian PNS dan Informasi Kepegawaian PNS	PROV KALTENG	1 tahun	976.085.000	PAD		1 tahun	766.420.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Tertaksananya pengadaan CPNS dan PPPK	PROV KALTENG	40 Orang Capra 300 Orang CPNS	251.688.000	PAD		40 Orang Capra 300 Orang CPNS	251.688.000
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Tertaksananya Administrasi Pemberhentian pegawai purna tugas BUP	PROV KALTENG	300 SK	70.000.000	PAD		300 SK	34.335.000
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	PROV KALTENG	1 tahun	83.578.000	PAD		1 tahun	63.578.000
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	PROV KALTENG	10.000 Data PNS 1 Aplikasi	230.754.000	PAD		10.000 Data PNS 1 Aplikasi	80.754.000
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Tertaksananya fasilitasi kelembagaan Profesi ASN (KORPRI)	PROV KALTENG	42 Kegiatan	340.065.000	PAD		42 Kegiatan	336.065.000
	TOTAL				12555.988.860				12808.339.617,00

Sumber : Dokumen Rencana Kerja BKD Prov. Kalteng 2023

Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dimana memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran rincian kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas.

Kebutuhan dana Indikatif keseluruhan dari program dan kegiatan yang direncanakan sebesar **Rp. 12.555.988.860,-**, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III CAPAIAN RENJA DAN FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

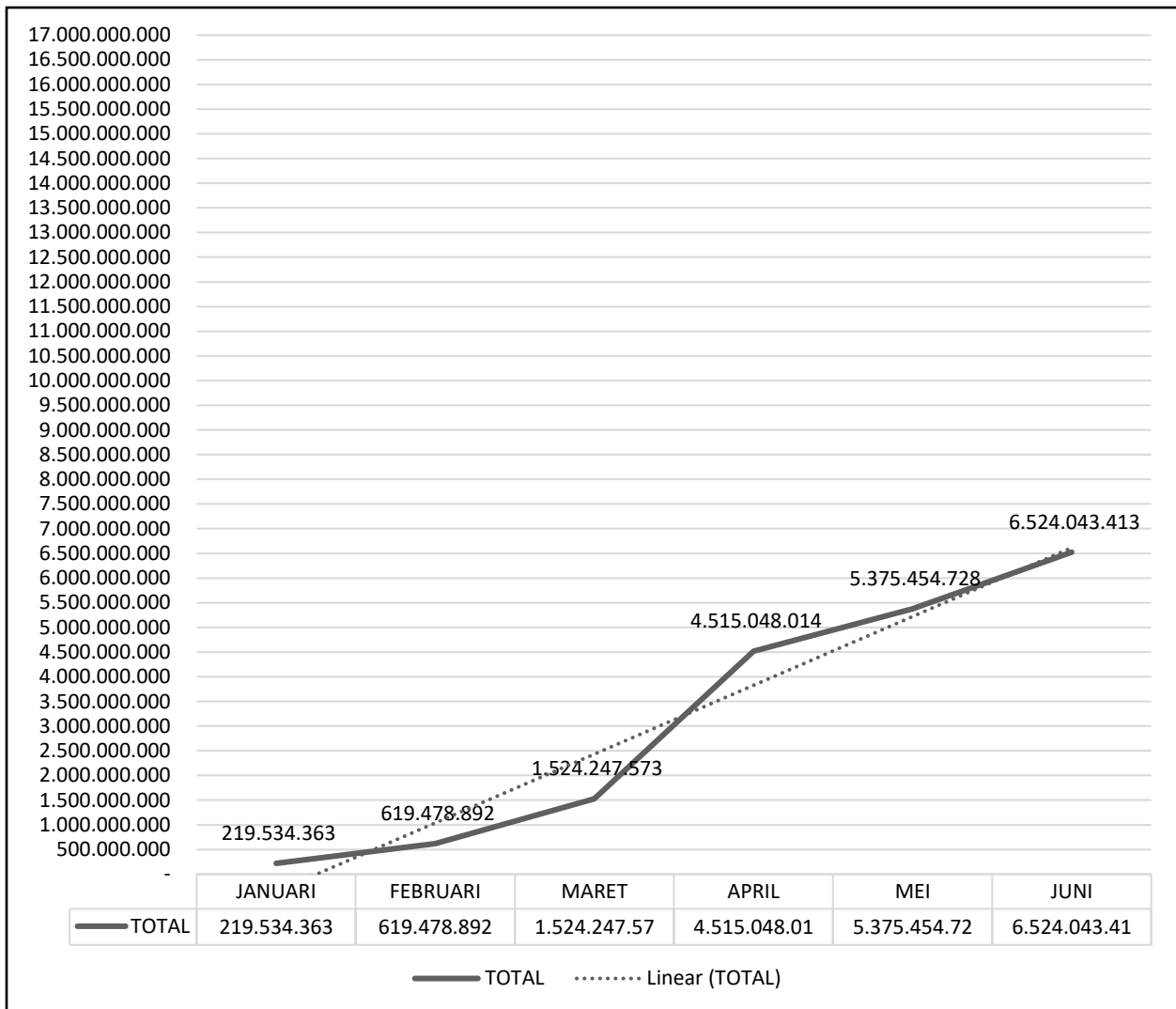
A. Evaluasi Pencapaian Rencana Kerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah Semester I Tahun 2023

Indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu program, kegiatan, serta sub kegiatan yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya. Indikator kinerja dalam Renja BKD Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada bidang kepegawaian.

B. Realisasi Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode Januari s.d. Juni 2023

Realisasi Keuangan BKD Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Data Realisasi Keuangan dapat menyediakan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut ini merupakan realisasi keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :

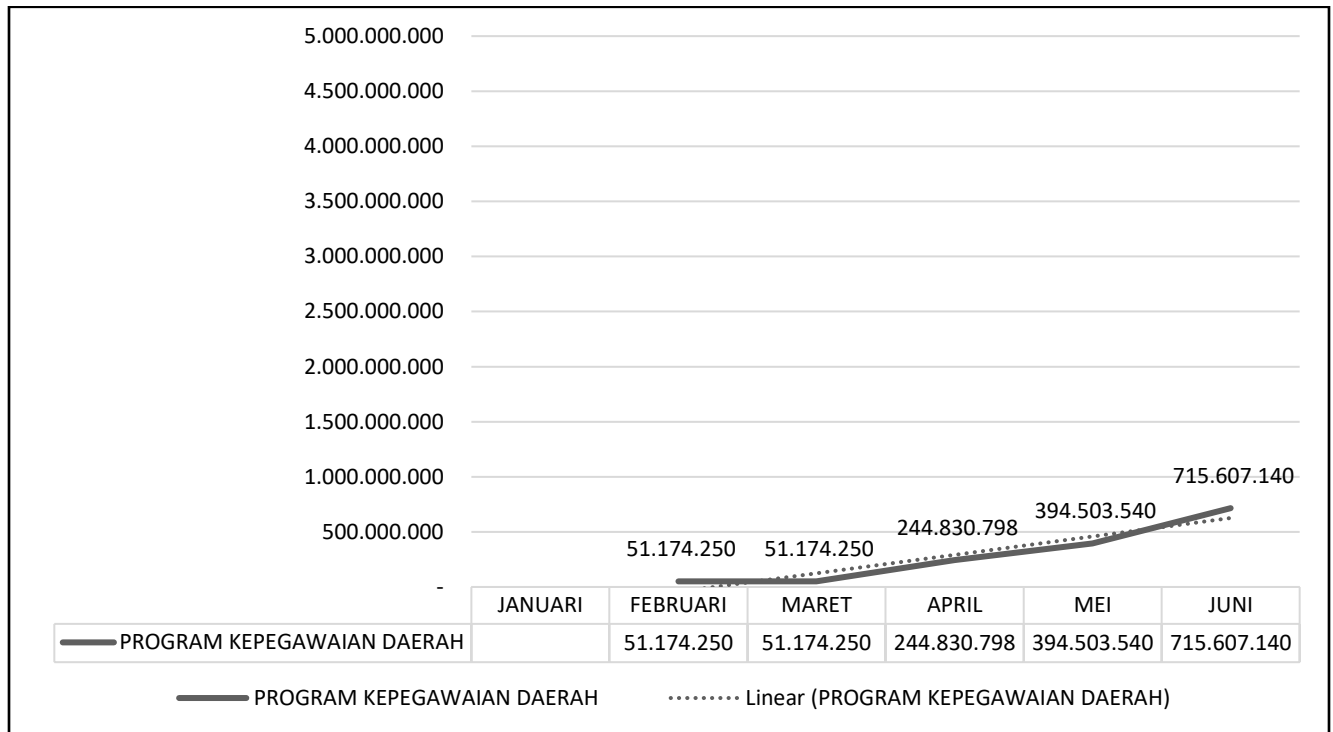
Gambar 1 Realisasi Keuangan BKD Provinsi Kalimantan Tengah Bulan Januari s.d. Juni 2023



Sumber : SIPD BKD Prov. Kalteng 2023

Secara keseluruhan, realisasi keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah Rp 6.524.043.413, - dengan capaian realisasi keuangan sebesar 37.81%. Adapun capaian tersebut masih jauh dari target capaian yang seharusnya pada semester I. Data yang lebih detail memperlihatkan, bahwa capaian keuangan BKD Provinsi Kalimantan Tengah sudah berada pada jalur yang tepat. Trend capaian keuangan bergerak naik, walaupun masih belum mencapai target pada Semester I Tahun 2023 ini. Kemudian juga diperlihatkan data capaian keuangan BKD Provinsi Kalimantan Tengah Semester I tahun 2023 berdasarkan program antara lain :

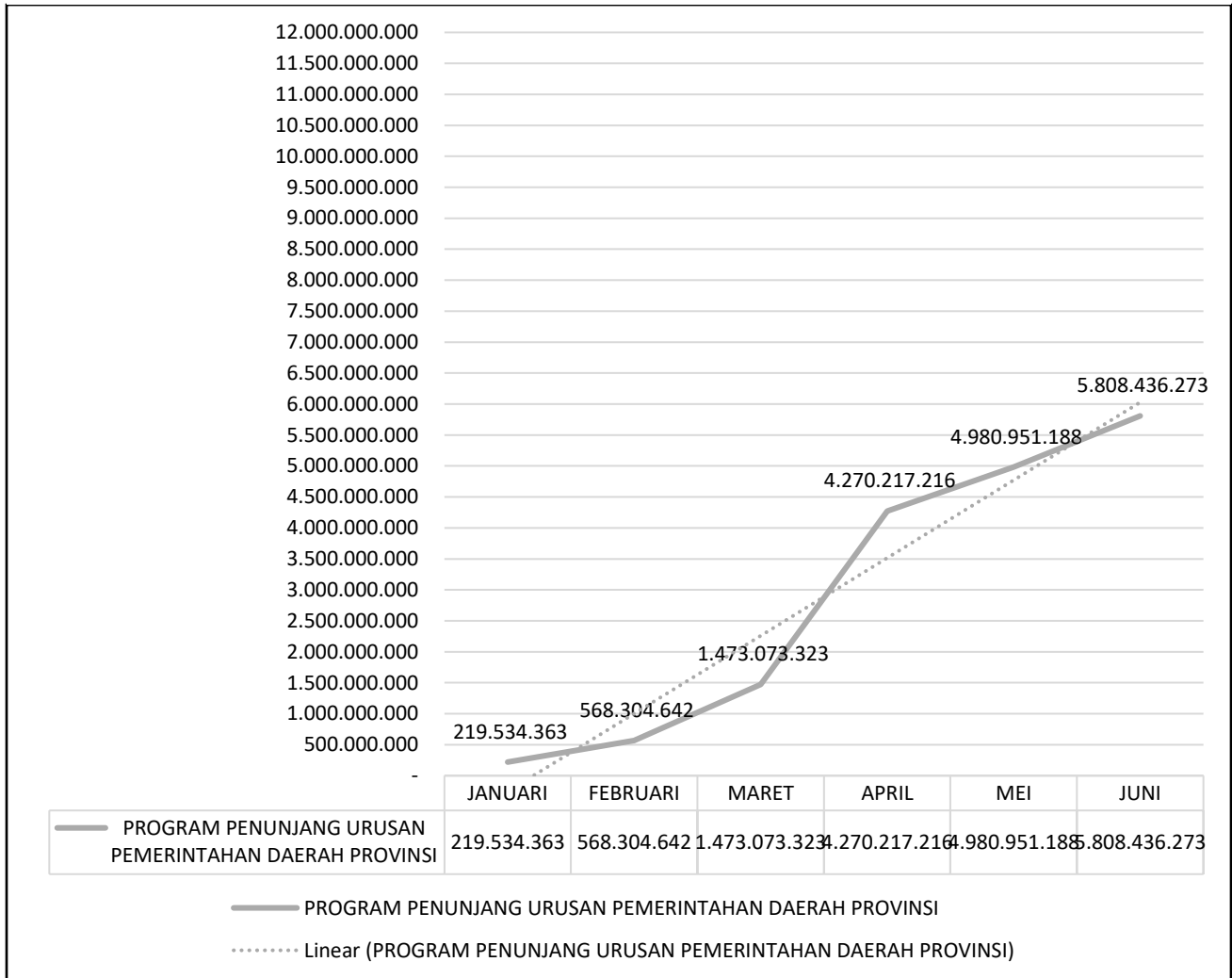
Gambar 2 Realisasi Keuangan BKD Provinsi Kalimantan Tengah Bulan Januari s.d. Juni 2023
Program Kepegawaian Daerah



Sumber : SIPD BKD Prov. Kalteng 2023

Untuk Program Kepegawaian Daerah mempunyai pagu anggaran sejumlah Rp. 5.021.589.899, - dengan realisasi sejumlah Rp 715.607.140 atau capaian target sebesar sebesar 14,25%. Capaian tersebut masih jauh dari pemenuhan target Semester I ini. Sedangkan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mempunyai pagu anggaran sejumlah Rp 12.234.383.622,- dengan realisasi sejumlah Rp 5.808.436.273,- atau capaian target sebesar sebesar 47,48%.

Gambar 3 Realisasi Keuangan BKD Provinsi Kalimantan Tengah Bulan Januari s.d. Juni 2023
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi



Sumber : SIPD BKD Prov. Kalteng 2023

Realisasi keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Semester I Tahun 2023 berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 Realisasi keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Semester I Tahun 2023 berdasarkan program dan kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.021.589.899		51.174.250	51.174.250	244.830.798	394.503.540	715.607.140
Mutasi dan Promosi ASN	1.497.067.600		22.835.000	22.835.000	159.003.498	168.852.698	255.819.098
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3.242.754.400		18.810.650	18.810.650	69.687.750	201.413.292	421.264.292
Pengembangan Kompetensi ASN	75.221.900						7.805.000
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	206.545.999		9.528.600	9.528.600	16.139.550	24.237.550	30.718.750
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.234.383.622	219.534.363	568.304.642	1.473.073.323	4.270.217.216	4.980.951.188	5.808.436.273
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.418.000				3.862.100	3.862.100	3.862.100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	118.600.000			36.000.000	43.590.000	43.590.000	43.590.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.155.272.715	219.534.363	439.855.603	1.072.594.633	1.804.558.721	2.218.949.075	2.917.359.065
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.817.299.683		17.112.800	95.401.300	2.023.886.700	2.152.464.100	2.211.317.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634.154.000			55.839.400	87.325.819	87.325.819	124.263.619
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000						
Penyediaan Jasa							

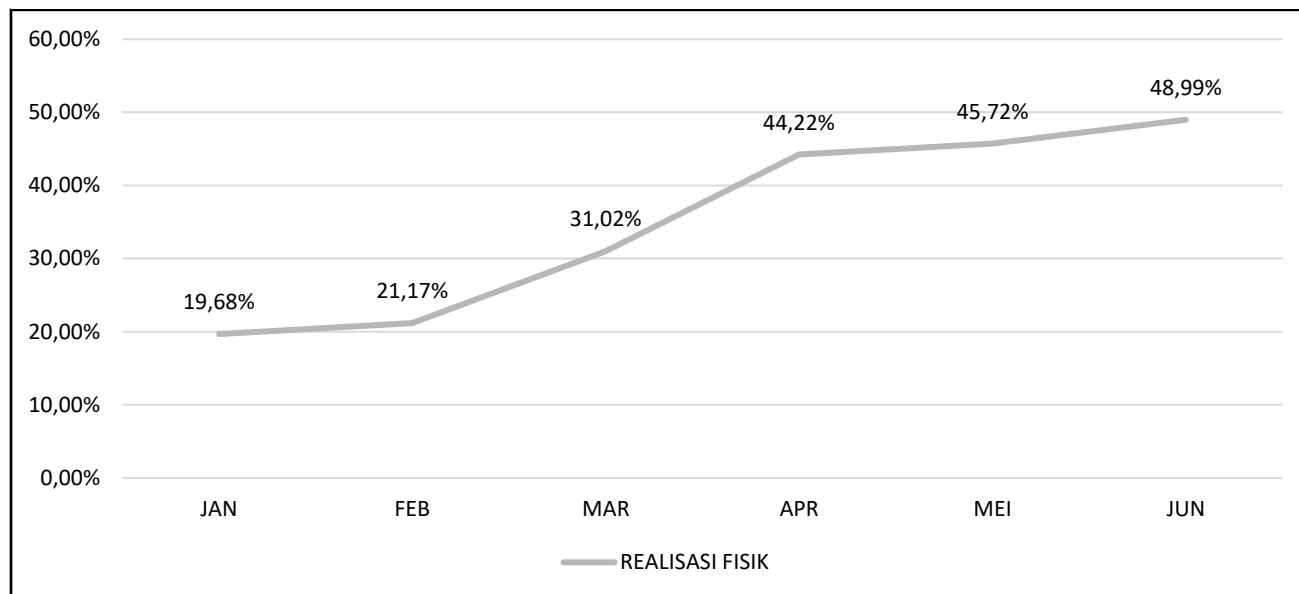
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1300.353.000		111.336.239	192.025.190	285.781.076	449.292.294	482.576.689
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.286.224			21.212.800	21.212.800	25.467.800	25.467.800
TOTAL	17.255.973.521	219.534.363	619.478.892	1.524.247.573	4.515.048.014	5.375.454.728	6.524.043.413

Sumber : SIPD BKD Prov. Kalteng 2023

C. Realisasi Fisik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Semester I Tahun 2023

Realisasi fisik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Semester I Tahun 2023 dimuat dalam grafik berikut :

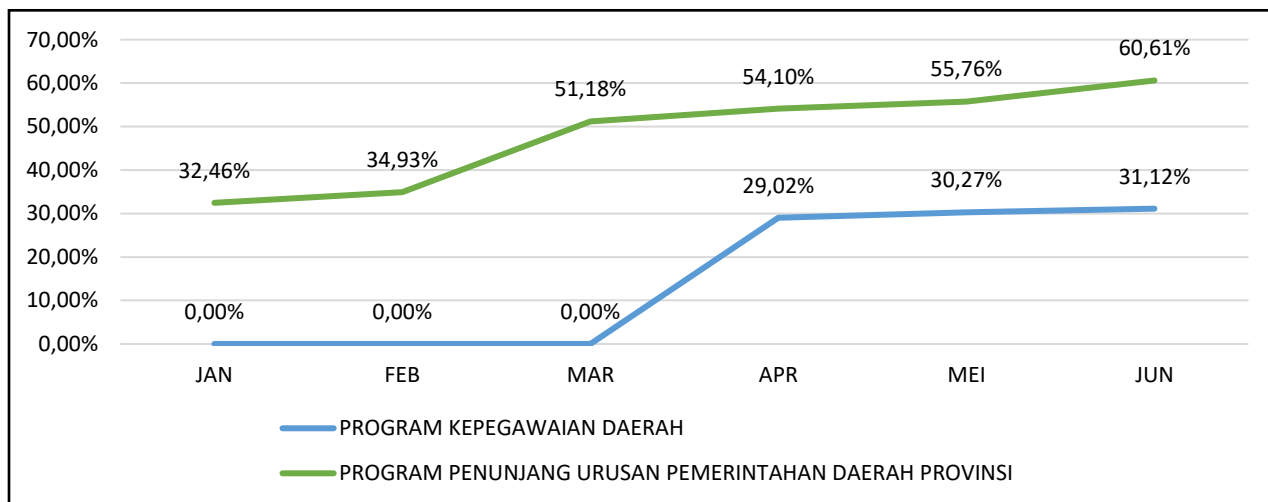
Gambar 4 Realisasi fisik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Semester I Tahun 2023



Sumber : Laporan Kinerja Bidang BKD Prov. Kalteng 2023

Adapun realisasi fisik BKD Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Program dimuat dalam grafik berikut :

Gambar 5 Realisasi fisik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Semester I Tahun 2023 Berdasarkan Program



Sumber : Laporan Kinerja Bidang BKD Prov. Kalteng 2023

Kemudian secara lebih terperinci realisasi fisik BKD Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kegiatan dan Sub Kegiatan dimuat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5 Realisasi Fisik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Januari s.d. Juni 2023

Prog	Keg	Sub Keg	Pagu	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Jan	% Jan	Feb	% Feb	Maret	% Maret	April	% April	Mei	% Mei	Juni	% Juni
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.321.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	1	14,29%	2	28,57%	2	28,57%	2	28,57%	2	28,57%	4	57,14%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.965.224	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan	1	10,00%	2	20,00%	2	20,00%	2	20,00%	2	20,00%	3	30,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gajid dan Tunjangan ASN	7.127.879.715	Jumlah Orang yang Menerima Gajid dan Tunjangan ASN	52	Orang Bulan	52	100,00%	52	100,00%	52	100,00%	52	100,00%	52	100,00%	52	100,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.864.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan Semesteran SKPD	13.529.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan Semesteran SKPD	1	Laporan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD	23.418.000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD	1	Dokumen	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.200.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	140	Setel	-	0,00%	-	0,00%	140	100,00%	140	100,00%	140	100,00%	140	100,00%

Prog	Keg	Sub Keg	Pagu	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Jan	% Jan	Feb	% Feb	Maret	% Maret	April	% April	Mei	% Mei	Juni	% Juni
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	59.400.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.900.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disedakan	1	Paket	-	0,00%	-	0,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Perakitan dan Petengkapan Kantor	2.260.838.323	Jumlah Paket Perakitan dan Petengkapan Kantor yang Disedakan	4	Paket	-	0,00%	-	0,00%	2	50,00%	3	75,00%	3	75,00%	4	100,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.976.500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disedakan	1200	Paket	-	0,00%	-	0,00%	600	50,00%	700	58,33%	800	66,67%	900	75,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disedakan	2	Dokumen	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	417.584.860	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1	8,33%	2	16,67%	3	25,00%	4	33,33%	5	41,67%	6	50,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Utusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disedakan	1	Unit	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	432.293.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang Disedakan	12	Laporan	1	8,33%	2	16,67%	3	25,00%	4	33,33%	5	41,67%	6	50,00%

Prog	Keg	Sub Keg	Pagu	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Jan	% Jan	Feb	% Feb	Maret	% Maret	April	% April	Mei	% Mei	Juni	% Juni
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	868.060.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1	8,33%	2	16,67%	3	25,00%	4	33,33%	5	41,67%	6	50,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	264.800.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30	Unit	30	100,00%	30	100,00%	30	100,00%	30	100,00%	30	100,00%	30	100,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	27.250.000	Jumlah Perabotan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200	Unit	200	100,00%	200	100,00%	200	100,00%	200	100,00%	200	100,00%	200	100,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	321.754.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.350.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37	Unit	37	100,00%	37	100,00%	37	100,00%	37	100,00%	37	100,00%	37	100,00%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	240.483.400	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	77.609.000	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	300	Dokumen	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	192	64,00%	192	64,00%	192	64,00%

Prog	Keg	Sub Keg	Pagu	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Jan	% Jan	Feb	% Feb	Maret	% Maret	April	% April	Mei	% Mei	Juni	% Juni
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	2275.330.000	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	78.578.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian	570.754.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	Dokumen	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	49.043.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	100	Dokumen	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	50	50,00%	50	50,00%	50	50,00%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kerjakan Pangkat ASN	148.024.600	Jumlah Pengelolaan Kerjakan Pangkat ASN	4800	Laporan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2500	52,08%	2500	52,08%	2500	52,08%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	1.300.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	800	Dokumen	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	350	43,75%	350	43,75%	350	43,75%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	40.791.700	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikebla	4	Dokumen	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2	50,00%	2	50,00%	2	50,00%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	34.430.200	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	800	Orang	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	139	17,38%	189	23,63%	278	34,75%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	83.295.999	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	250	Orang	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	103.250.000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50	Laporan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	25	50,00%	30	60,00%	30	60,00%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	20.000.000	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dlayani	10	Dokumen	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5	50,00%	5	50,00%	5	0,00%

Sumber : Laporan Kinerja Bidang BKD Prov. Kalteng 2023

D. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil telaahan terhadap pencapaian Rencana Kerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah Semester I Tahun 2023, berikut ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan BKD Provinsi Kalimantan Tengah yang mempengaruhi pencapaian kinerja ditinjau dari sasaran Rencana Kerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Sasaran Renja BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah masih belum terlaksana secara optimal	Adanya regulasi/kebijakan terkait Reformasi Birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan tingkat Perangkat Daerah
	Rentang pengawasan (span of control) dalam struktur organisasi di Provinsi Kalimantan Tengah yang besar membuat pengambilan keputusan dalam proses kerja yang melibatkan unit kerja lain membutuhkan waktu yang relatif lama	Tersedianya sarana dan prasarana terkait Pelayanan Kepegawaian pada BKD Provinsi Kalimantan Tengah dalam menunjang efektivitas manajemen ASN
	Adanya dualisme regulasi antara peraturan Kemenpan RB dengan Peraturan BKN	Tersedianya data dan informasi terkait kepegawaian yang akurat dan up to date
	Belum terukurnya indeks profesionalitas ASN Provinsi Kalimantan Tengah secara menyeluruh	Ketersediaan SDM aparatur yang siap dan mampu menduduki suatu jabatan melalui seleksi jabatan lowong secara terbuka

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Secara umum, pencapaian target kinerja pada Semester I pada tahun 2023 masih dalam kategori Sangat Rendah. Selain itu telah dilakukan kegiatan inovatif dan kegiatan yang diperbaharui dalam pelayanan publik oleh Kepala BKD / PNS di jajaran Pemprov Kalteng.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Percepatan proses pengadaan barang/jasa, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan/kegiatan;
2. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan OPD dan Pemerintah Pusat;
3. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan; serta
4. Koordinasi dan komunikasi internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara lebih intensif.

Kerjasama antar unit di lingkungan internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi nilai-nilai organisasi yang bertumbuh dan berkembang. Demikian Laporan Evaluasi Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Semester I Tahun 2023 ini disusun sebagai instrumen monitoring kinerja dan harapannya dapat dipergunakan dengan baik untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode-periode mendatang.